



IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN CIBODAS KECAMATAN CIBODAS KOTA TANGERANG

Aramita Dinah Idelia, Yusmedi Yusuf, Irvan Arif Kurniawan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Email: 1701010028@students.unis.ac.id; yusmedi@unis.ac.id; iakurniawan@unis.ac.id

ABSTRAK

Permukiman kumuh termasuk salah satu persoalan yang telah ditemui dan dapat dirasakan pada berbagai kota-kota di Indonesia. Program yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia adalah program KOTAKU yang pembentukannya sebagai upaya untuk peningkatan kualitas permukiman kumuh secara nasional. Kelurahan Cibodas masuk pada satu dari kelurahan di Indonesia yang menerima program KOTAKU. Penelitian dilakukan dengan analisis metode kualitatif yang hasilnya berupa data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KOTAKU di Kelurahan Cibodas pada dimensi komunikasi (communication) sudah terkomunikasikan dengan baik melalui musyawarah perencanaan pembangunan, rapat pertemuan antar implementor dan sosialisasi. Dalam dimensi sumber daya (resources) kemampuan implementor yang baik dengan peningkatan melalui pelatihan-pelatihan, juga fasilitas pendukung sarana prasarana untuk memudahkan jalannya program dan anggaran melalui Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) dan swadaya. Pada dimensi sikap pelaksana atau disposisi (disposition) terdapat komitmen yang berpengaruh optimal melalui Surat Perjanjian Kerja (SPK) menghasilkan transparansi dengan adanya kegiatan Launching Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) dan pertanggungjawaban dengan pembuatan Lembar pertanggungjawaban (LPJ) dan audit kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta pada dimensi struktur birokrasi (bureaucracy structure) terdapat Standart Operating Procedure (SOP) waktu tiga bulan kerja dan pembagian tugas antar pelaksana program.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Kota Tanpa Kumuh

A. PENDAHULUAN

Pusat permukiman disertai kegiatan masyarakat masuk pada bagian kota di Indonesia yang pertumbuhannya berkembang secara pesat sehingga menimbulkan dampak bagi berbagai aspek-aspek kehidupan. Salah satu aspek yang berdampak yaitu munculnya permukiman kumuh di perkotaan. Hal tersebut disebabkan karena pada perkembangannya, kota tidak terlepas dari urbanisasi (Ray, 2017) banyaknya penduduk yang bertambah hingga adanya pembangunan yang semakin rapat dan permukiman yang semakin padat. Permukiman kumuh juga disebabkan karena urbanisasi yang menimbulkan pertumbuhan penduduk menjadikan masyarakat secara bersamaan membangun tempat tinggal karena kebutuhan tempat tinggal yang tidak sepadan

dengan perencanaan kota untuk melaksanakan pembangunan di permukiman yang memenuhi syarat dan memadai (Uddin, 2018).

Permukiman kumuh terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Sebagai upaya pengurangan permukiman kumuh, diterbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang kemudian tercipta Surat Edaran Kementerian PUPR Ditjen Cipta Karya Nomor 40 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Kota Tanpa Kumuh yang menjadi dasar dari implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di seluruh daerah Indonesia.

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dijalankan dengan berbagai kegiatan dalam kawasan kumuh dengan pembangunan dalam infrastruktur sehingga tercapainya pengentasan pada permukiman kumuh perkotaan, penanganan tercapai tanpa menghadirkan masalah kumuh baru maka mampu menjadikan kualitas lingkungan tinggal masyarakat dalam mewujudkan kota yang produktif layak huni serta berkelanjutan.

Pemerintah Kota Tangerang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Walikota Tangerang No. 663 tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang kumuh di wilayah Kota Tangerang. Dalam SK tersebut terdapat 27 Kelurahan yang merupakan penerima program termasuk Kelurahan Cibodas. Pengimplementasian program didasarkan dengan terdapat kawasan kumuh yang disebabkan karena permukiman yang belum layak. Permasalahan tersebut disebabkan karena infrastruktur yang kurang memadai yang menimbulkan wilayah yang kumuh, lingkungan yang dipenuhi genangan air dan ketidakteraturan bangunan. Permasalahan lainnya didasari atas lokasi yang dipenuhi dengan kepadatan penduduk yang menempati wilayah Kelurahan Cibodas serta kondisi tipologi wilayah menimbulkan padatnya bangunan yang terpusat di sebelah timur kelurahan.

Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas ini mengarahkan terhadap penciptaan permukiman dengan hasil pengurangan terhadap kekumuhan dan meningkatkan aspek infrastruktur. Upaya dalam keberhasilan implementasi di lakukan oleh implementor dan masyarakat dengan disertai penggunaan anggaran. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas.

Kebijakan Publik

Kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye (Agustino, 2016:15) berupa “ What governments do , why they do it , and what difference it makes ”. Artinya ialah pekerjaan yang oleh dikerjakan Pemerintah dimana pekerjaan ini menghasilkan sesuatu atau “what difference it makes” dan memiliki tujuan dalam melakukan penyelesaian masalah, peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan lainnya.

Implementasi

Berdasarkan pandangan dari Anderson (Agustino, 2016:127) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan ialah keseluruhan cakupan dalam penerapan kebijakan

yang didalamnya terdapat proses kerjasama beragam aktor, tahapan, teknik kerja, organisasi sebagai cara untuk tercapainya suatu tujuan program. Menurut Gordon (Mulyadi, 2015:24) bahwa didalamnya berisi kegiatan yang bertujuan untuk merealisasikan suatu program.

Model Implementasi Kebijakan

Pengembangan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III memiliki perspektif top - down (Agustino, 2016:136-141) Dalam melihat penentuan keberhasilan dalam implementasi kebijakan menurut Edward III ditentukan oleh empat indikator, meliputi :

1. Communication

Untuk mencapai tujuan dari suatu implementasi kebijakan publik, diperlukan komunikasi karena sangat menentukan terciptanya keberhasilan. Dalam komunikasi terdapat informasi yang ditujukan untuk memberi pemahaman terkait isi, arah, tujuan serta kelompok sasaran kepada pihak yang terlibat sehingga seluruhnya mampu untuk mempersiapkan dengan benar.

2. Resources

Sumber daya ialah salah satu hal yang dapat menjadi pengaruh atas keberhasilan suatu kebijakan. Staf berperan penting dalam implementasi kebijakan sebab manusia ialah sumber daya utama, termasuk Informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan dan wewenang dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur secara politik, kewenangan ialah legitimasi atau otoritas untuk para pelaksana. Dalam implementasi kebijakan, faktor penting yang diperlukan juga ialah fasilitas fisik sebab suatu implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tidak ada fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana.

3. Disposition

Dalam melakukan pendekatan mengenai implementasi suatu kebijakan, disposisi termasuk satu dari faktor penentu. Para pelaksana kebijakan harus mengetahui hal-hal yang perlu dikerjakan dan harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut jika implementasi suatu kebijakan ingin berjalan secara efektif.

4. Bureaucracy Structure

Sebagai pengarah ke yang lebih baik, struktur birokrasi terdapat dua karakteristik didalamnya, yaitu menciptakan Standar Operating Procedures (SOP) yang menciptakan kemungkinan untuk para pelaksana kebijakan dalam melakukan kegiatan setiap hari yang sesuai pada penetapan standar minimum yang ada dan melaksanakan fragmentasi sebagai penyebaran tanggung jawab pada berbagai kegiatan, program maupun aktivitas yang sesuai dengan masing-masing bidang pada beberapa unit kerja.

B. METODE

Dalam mencapai penelitian yang terarah, metode kualitatif deskriptif digunakan karena metode kualitatif relevan dengan penelitian yang bertujuan untuk memahami serta menggali data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Informan dalam

penelitian terdiri dari Koordinator Kota Tangerang, Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Madani Kelurahan Cibodas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Madani Kelurahan Cibodas, Lurah Kelurahan Cibodas, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Cibodas, RT, RW dan masyarakat Kelurahan Cibodas. Analisis data dilakukan dengan reduksi data dan untuk keabsahan data melalui triangulasi dimana penggunaannya dengan cara menggabungkan sumber data dan teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2017:241). Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber dengan melakukan pengecekan topik yang sama kepada berbagai sumber

C. HASIL DAN DISKUSI

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas telah terealisasi sehingga menghasilkan pengurangan terhadap wilayah kumuh dan meningkatkan pembangunan pada infrastruktur. Pengimplementasian program ini didukung oleh Koordinator Kota Tangerang, Tim Fasilitator, Lurah Kelurahan Cibodas, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Cibodas, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kelurahan Cibodas, RT, RW dan masyarakat Kelurahan Cibodas. Dalam tahapan implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ini diawali dengan tahap perencanaan berupa sosialisasi dan kegiatan tracking atau pengukuran yang dilakukan untuk sinkronisasi data baseline yang dilanjutkan dengan perencanaan dengan menyusun dokumen Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) hasil dari sosialisasi serta musyawarah perencanaan pembangunan dan melakukan survey titik lokasi yang akan dilakukan pembangunan. Adapun pelaksanaan program ini telah membangun drainase, jalan lingkungan dan bangunan hunian di wilayah kumuh Kelurahan Cibodas. Setelah pelaksanaan telah dilakukan, terdapat keberlanjutan program dengan pemeliharaan oleh masyarakat dengan pembentukan Kelompok Pemanfaatan dan (KPP) yang dibentuk oleh RT di setiap wilayah yang sudah dilakukan pembangunan.

Berdasarkan hasil dari wawancara beserta observasi, berikut hasil implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas:

1. Communication

Communication merulakan salah satu dimensi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang berhasil karena menurut Miller (Mulyana, 2013) komunikasi adalah pemberi informasi berupa sumber yang dengan sadar memiliki niat untuk memberi pengaruh pada perilaku penerima. Sebagaimana yang diungkap oleh Edward III (Agustino, 2016) bahwa indikator komunikasi berupa penyampaian informasi diperlukan penyampaian informasi yang baik sehingga menghasilkan implementasi yang baik.

Dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas, komunikasi yang dilakukan oleh para implementor sudah terkomunikasikan dengan baik karena telah berjalannya 3 (tiga) elemen dari dimensi komunikasi tersebut. Dengan berjalannya indikator komunikasi yaitu penyampaian atau transmisi (transmission) informasi tentang program KOTAKU dibuktikan dengan diawali pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bersama

masyarakat yang menghasilkan hasil rencana pembangunan pada wilayah kumuh Kelurahan Cibodas. Selain itu, komunikasi antar implementor yang dilakukan berupa sosialisasi dilakukan setiap tiga kali dalam satu bulan dan rapat pertemuan setiap lima kali dalam satu bulan.

Pada kejelasan informasi (clarity) yang diberikan oleh implementor secara komprehensif yang dilakukan dengan berbagai upaya bukan hanya mengumpulkan masyarakat dalam suatu forum namun secara langsung menemui masyarakat ke tempat tinggalnya untuk memberikan informasi bahwa akan diberlakukannya pembangunan di sekitar lingkungan masyarakat. Selain itu, kejelasan informasi juga dilakukan melalui pemasangan banner program yang masyarakat dapat lihat setiap harinya.

Dalam pemberlakuan konsistensi informasi (consistency) yang dilaksanakan oleh implementor dibuktikan dengan pelaksanaan rapat pertemuan antar pihak yang rutin dijalankan dengan lima kali pertemuan dalam satu bulan untuk membahas pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaannya dilanjutkan dengan implementor setiap sore hari mengawasi jalannya pembangunan dan membahas persiapan pembangunan seperti material yang akan digunakan, tahapan pembangunan yang akan dilakukan untuk keesokan harinya sehingga setiap proses pembangunan yang dilakukan dapat berjalan sesuai prosedur, tidak melenceng, dan pengerjaan yang dilakukan dapat efektif.

Seiring berjalannya komunikasi dengan baik, adanya penerimaan secara terbuka yang dilakukan oleh masyarakat dengan ditandai oleh tidak adanya penolakan dari masyarakat untuk melaksanakan pembangunan di lingkungan masyarakat dan implementor yang turut berkoordinasi dan berupaya bersama dalam menciptakan pengurangan terhadap kawasan kumuh di Kelurahan Cibodas. Dengan pelaksanaan komunikasi yang baik, jelas dan konsisten, maka memberikan efek pada kemudahan penyelenggaraan dan pencapaian keberhasilan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

2. Resources

Resources menunjuk perihal sumber daya aparatur, anggaran yang digunakan serta dari segi memadainya staf dalam program, kemampuan-kemampuan staf sebagai penunjang tugasnya dan fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program. Sumber daya merupakan hal penting yang dibutuhkan setiap pelaksanaan program demi terciptanya keberhasilan program yang sedang berjalan.

Sumber daya manusia dalam hal ini implementor dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sudah memadai karena setiap tingkatan pada pelaksanaan program ini telah diisi dengan implementor mulai dari tingkat Kota hingga pada tingkat Kelurahan. Kemudian, seluruh implementor program memiliki kemampuan maupun keahlian yang sesuai dengan tugas yang dijalani. Terdapat penugasan tenaga ahli dari Koordinator Kota Tangerang untuk Kelurahan Cibodas sebagai pendamping dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Ditambah dengan pelatihan bagi implementor program seperti Pelatihan Dasar Fasilitator maupun Pelatihan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dengan kata lain, keahlian dan kemampuan tersebut berdampak pada kualitas kinerja dari pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mampu teralisasi dengan maksimal.

Ditambah dengan adanya fasilitas pendukung yang memadai untuk membantu

implementor dalam meringankan pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh pelaksana dan membantu mendorong keberhasilan pelaksanaan program. Fasilitas pendukung tersebut berupa mobil derek yang digunakan untuk memudahkan dalam pemindahan material u-ditch untuk pembangunan fisik infrastruktur sehingga dalam prosesnya dapat berjalan dengan tertata dan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pada sumber daya anggaran program KOTAKU ini berasal dari APBD Kota Tangerang dalam bentuk pemberian Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) dan swadaya. Anggaran tersebut merupakan hasil dari usulan musrenbang yang disetujui oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk pengentasan kumuh. Anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur pada wilayah di setiap RW dan RT di Kelurahan Cibodas yang masuk pada kawasan kumuh.

3. Disposition

Dalam keberhasilan implementasi program diperlukan suatu sikap pelaksana atau disposisi yang dapat menentukan terlaksananya program dengan maksimal. Maka diperlukan suatu efek disposisi yang bukan hanya kemampuan yang ditonjolkan dalam diri implementor program namun sebuah komitmen atau keinginan untuk masuk terlibat dalam pengerjaan program juga perlu untuk tumbuh dalam pola pikir pelaksana program. Aspek dalam sikap pelaksana ini menimbulkan efek disposisi yang berpengaruh terhadap berjalannya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Efek disposisi berkaitan dengan penerimaan, pemahaman dan intensitas tanggapan terhadap kebijakan.

Hasil dari pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Cibodas ini terdapat kesesuaian dengan tujuan program. Penumbuhan suatu kesadaran pada implementor melalui komitmen terlihat pada rasa ingin untuk menjalankan tugas disetiap tingkatan melalui surat perjanjian kerja (SPK) dan memberi pemahaman bahwa setiap tugas yang dilakukan oleh implementor memberikan manfaat yang positif bagi masyarakat luas. Hal tersebut memiliki efek yang besar dengan bertumbuhnya komitmen yang tinggi untuk pelaksanaan program di setiap diri pelaksana. Ditambah dengan pemberlakuan pengawasan-pengawasan, monev dan pelaksanaan audit.

Secara signifikan hasil dari setiap dukungan yang diberikan oleh implementor menunjukkan sikap yang positif dengan munculnya intensitas tanggapan terhadap program yang dijalankan dengan tetap berkomitmen yang tinggi dengan transparansi atau keterbukaan kepada seluruh masyarakat. Transparansi ini dilakukan dengan pelibatan masyarakat dalam setiap proses dalam pelaksanaan program yang masuk dalam keterbukaan anggaran yang digunakan. Implementor secara langsung membuat kegiatan launching Bantuan Pemerintah kepada Masyarakat (BPM) yang mengundang masyarakat Kelurahan Cibodas dan pembuatan papan proyek yang menunjukkan rincian anggaran pembangunan.

Tanggung jawab ditunjukkan dengan adanya rembug warga tahunan (RWT) dan audit untuk kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Madani. Hal tersebut menjadi suatu bukti atas adanya keinginan implementor untuk menciptakan suasana yang dinamis sehingga secara parsial menunjukkan bahwa implementasi padaindikator sikap pelaksana atau disposisi berpengaruh secara optimal.

4. Bureaucracy Structure

Keselarasan suatu organisasi dengan mekanisme yang dijalankan dalam implementasi program berkaitan dengan struktur birokrasi. Dalam struktur birokrasi, Dalam struktur birokrasi terdapat Standard Operational Procedure (SOP) yang digunakan sebagai proses optimalisasi ketersediaan waktu sehingga adanya keseragaman aktivitas-aktivitas implementor. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya fleksibilitas antar pihak pada peraturan yang diterapkan. Pelaksanaan pembangunan diwajibkan hanya pada jangka waktu kerja 3 bulan dengan mekanisme pencairan dana anggaran yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang kepada Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Madani Kelurahan Cibodas yang kemudian dari BKM ada pencairan dana kepada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Madani Kelurahan Cibodas untuk selanjutnya kepada masyarakat penerima manfaat.

Pelaksanaan SOP tersebut berdampak positif bagi tiap unit pelaksana program yang mana terdapat pada tingkat Kota oleh Koordinator Kota Tangerang. Untuk tingkat Kelurahan terdapat Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Dalam pelaksanaan program di Kelurahan Cibodas, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) bertugas untuk memfasilitasi dan menjadi motor penggerak penggunaan bantuan pemerintah kepada masyarakat (BPM) dalam program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sehingga adanya kerjasama dari BKM, Pemerintah Kelurahan Cibodas dan masyarakat secara bersama menggerakkan masyarakat dalam membangun wilayah Kelurahan Cibodas pada setiap proses perencanaan, pelaksanaan, sehingga masyarakat merasa memiliki hasil pembangunan yang kemudian akan dipelihara dengan baik. Pada pelaksana kegiatan, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) melakukan pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk menjalankan pembangunan sesuai arahan dari BKM tingkat RW dan RT dalam pembelanjaan dan mengatur pada tingkat RW dan RT.

Dampak dari adanya struktur birokrasi ini terlihat bahwa adanya keseragaman aktivitas yang menjadikan pelaksana program pada tingkat Kota yaitu Koordinator Kota Tangerang melakukan monitoring di tingkat Kelurahan yang menunjukkan garis koordinasi yang jelas dan terarah antar pelaksana program sehingga secara parsial pada aspek struktur birokrasi sudah direalisasikan sesuai pada mekanisme yang ada.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa telah terciptanya keberhasilan implementasi program KOTAKU di Kelurahan Cibodas ditandai dengan berlangsungnya sosialisasi yang dilaksanakan secara berkala ditambah dengan keterlibatan masyarakat dalam usulan pembangunan pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) bersama implementor dan koordinasi antar implementor di setiap tingkatan yang memiliki kemampuan serta keahlian yang memadai dengan dibekali pelatihan-pelatihan khusus implementor. Program KOTAKU dilaksanakan oleh implementor yang berkomitmen untuk menjalankan tanggungjawabnya karena telah diberlakukan surat perjanjian kerja (SPK) dan pemasangan papan proyek anggaran pada titik lokasi pembangunan maka munculnya

transparansi dengan pembuatan kegiatan sosialisasi bagi masyarakat tentang anggaran yang akan digunakan serta pemberian tanggung jawab yang diemban dengan audit kepada BKM dan pembuatan lembar pertanggungjawaban (LPJ).

Saran

1. Diperlukan pemberian pemahaman secara terstruktur dan rutin bahwa apabila pembangunan telah selesai, masyarakat saling bersinergi dalam pemeliharaan sehingga pemanfaatan dalam jangka waktu yang panjang.
2. Diperlukan peningkatan pengawasan pada implementor dan masyarakat ada antisipasi terhadap resiko kesalahan pada program yang berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*: Bandung: Alfabeta.
- Kelurahan Cibodas. (2019). *Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP)*. Tangerang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). (Petunjuk Pelaksanaan Program KOTAKU Tingkat Kelurahan/Desa (Juklak-2). Jakarta: Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Mulyadi, D. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Nurhasanah. (2019). Implementasi Kebijakan Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 58(1), 58–70. <https://doi.org/10.33474/jisop>
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 20 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
- Permata Sari, A. C. (2018). Analisis Implementasi Pembangunan Partisipatif dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi Komparatif : Desa Bligo Kecamatan Candi dan Desa Jiken, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(2), 57. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i2.452>
- Ray, B. (2017). Quality of life in selected slums of Kolkata: a step forward in the era of pseudo-urbanisation. *Local Environment*, 22(3). <https://doi.org/10.1080/13549839.2016.1205571>
- Sari, Indri Diah., H. Hardilina., & H. Pardi. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. *PubliKA, Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(4). <https://doi.org/10.26418/PUBLIKA.V8I4.2515>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Uddin, N. (2018). Assessing urban sustainability of slum settlements in Bangladesh: Evidence from Chittagong city. *Journal of Urban Management*, 7(1). <https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.03.002>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman